

**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA**
*(Studi kasus pada kelompok PKK Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten
Jember Juara tingkat Nasional)*

Lutfi Ariefianto, M.Pd*

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan suatu daerah merupakan hasil dari keterlibatan komponen masyarakat didalamnya, mengapa demikian karena didalam masyarakat memiliki kemampuan yang berkualitas. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan bagi komponen masyarakat adalah termasuk kebutuhan utama bagi terciptanya kemakmuran dan keadilan daerah.

Menurut Fakih dalam Rogib (2003:4) menerangkan bahwa perempuan dilarang keluar rumah, mengenyam pendidikan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai mana laki-laki. Munculnya kaum perempuan yang memperjuangkan hak mereka yang dirasakan ter subordinasi, dengan tidak memberikan porsi yang cukup signifikan untuk memperoleh hak di berbagai bidang (baik bidang politik, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia) merupakan salah satu masalah yang saat ini menjadi sorotan publik.

Populasi penduduk khususnya perempuan cenderung bertambah, dan pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah pembangunan yakni dari segi kuantitas, karena pada tingkat tertentu menjadi beban pembangunan. Namun pada sisi lain perempuan dipandang sebagai aset pembangunan karena hakekatnya merupakan suatu sumber daya insani yang memiliki potensi yang dapat di dayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor. Maka benang merah/ kontek yang menjadi sorotan adalah bagaimana mengelola berbagai aset yang melekat pada perempuan itu menjadi modal atau pendorong pembangunan nasional. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1999-2004 kebijakan tentang perempuan merupakan pengakuan prestasi perempuan terakhir ini. Intinya adalah adanya kesempatan yang pantas bagi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan dan kontribusi perempuan telah diakui dalam rencana kebijakan nasional sebagai suatu pernyataan niat politik warga negara Indonesia.

Mewujudkan arti monumental perempuan ternyata tidaklah mudah. Usaha kearah kesetaraan perempuan memunculkan berbagai masalah dalam bidang perempuan. Menjonjolnya perempuan pada lawan jenisnya yang teraktualisasi dalam berbagai sikap dan tingkah laku, ideologi gender, norma dan nilai endosentris, budaya dan tradisi masyarakat, dan kekerasan terhadap kaum perempuan mengakibatkan perempuan dalam subordinasi pria dan eksploitasi. Menurut Tjokrowinoto dalam Sadiyahem (2007), bahwa sejarah manusia pada masa lalu telah menciptakan mitos-mitos hubungan laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya cenderung menempatkan posisi perempuan pada posisi terbelakang. Posisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa ditolak tersebut pada akhirnya pada masyarakat berkembang image yang tidak memberikan kesamaan pada

kedua jenis manusia tersebut dan pada akhirnya apabila berhadapan dengan publik, perempuan merasa rendah diri, dan kadang-kadang salah tingkah.

Dalam bidang ekonomi upah perempuan yang terjun ke sektor produktif lebih rendah, jabatan yang terbatas, dan dikategorikan sebagai publik pinggiran. Sedangkan menurut Roqib (2003:111) menerangkan Peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh kondisi sosial dan kultural inilah yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda, dan ketidak proposionalan.

Rangkaian solusi terhadap fenomena tersebut di atas, telah diupayakan suatu aturan dasar dan peraturan yang intinya mengangkat sosok perempuan sejajar dengan pria walaupun peran perempuan dalam berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan semakin mendapat perhatian, tetapi tidak pelak peran perempuan sering mengalami pasang surut. Kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, perdagangan terhadap perempuan, merupakan kendala serius peningkatan kesetaraan perempuan.

Meskipun beragam faktor yang melatarbelakangi pemberdayaan perempuan dan segala berbagai gejala penyebab ketidakberdayaan perempuan khususnya perempuan desa termasuk miskin, dibebani berbagai pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya tetapi dalam relitas komunitas masyarakat tertentu justru mereka diberi kesempatan untuk memainkan perannya sebagai insan yang memiliki potensi untuk diunjukkerjakan.

Bertolak dari hal tersebut di atas Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur telah mendinamisasikan komunitas perempuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pendinamisasi perempuan pedesaan telah mampu mengaktualisasikan perannya dengan membentuk kader-kader perempuan dalam membangun desa. Dalam rangka mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan dikembangkan kegiatan perempuan desa diantaranya melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari gerakan PKK yaitu bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga baik di pedesaan maupun di perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat warga negara yang dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan,

kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan. Dalam mencapai sasaran tersebut di atas gerakan PKK dengan 10 program pokoknya yaitu : (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2) Gotong royong, (3) Pangan (4) Sandang (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga (6) Pendidikan dan keterampilan (7) Kesehatan (8) Pengembangan kehidupan berkoperasi (9) Kelestarian lingkungan hidup dan (10) Perencanaan sehat.

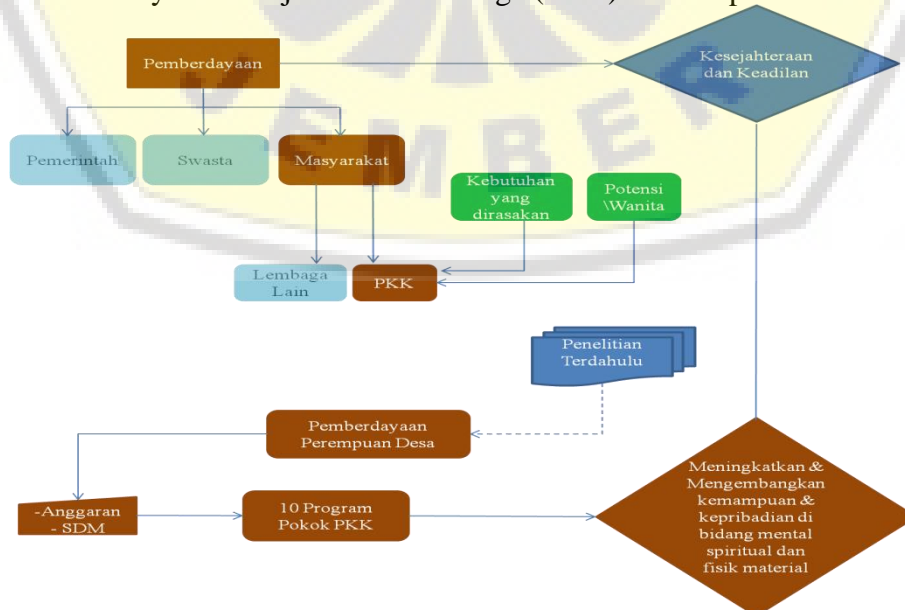
Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) ini dilakukan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa sebagaimana salah satunya yang berada di Kabupaten Jember di antaranya di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu memiliki program PKK yang di nobatkan sebagai peraih reward/penghargaan juara tingkat nasional.

Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan daerah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan komponen masyarakat sedemikian penting karena masyarakat mempunyai kemampuan yang mendukung kualitas karya yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. Pemberdayaan perempuan khususnya perempuan desa (di bidang sosial-budaya, politik, ekonomi, pendidikan) termasuk kebutuhan utama bagi terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Salah satu sebagai wahana pemberdayaan perempuan desa adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan PKK dalam rangka pemberdayaan perempuan desa, khususnya di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data model interaktif.

Kerangka Pikir Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Jember



B. Kajian Pustaka

Pendekatan Pembangunan Perempuan

Sejalan dengan tuntutan gerakan pembangunan pedesaan yang terus berkembang, telah memunculkan berbagai telaah kritis dalam pembangunan pedesaan diantaranya berkenaan dengan pembangunan eksistensi perempuan. Pada dasarnya telaah kritis tersebut akhirnya memberikan kesadaran baru bagi pengambil kebijakan pembangunan, sehingga pada tahun 1975 lahirlah apa yang disebut "dasa warsa PBB untuk perempuan". Dalam rangka itu, kebijakan-kebijakan terhadap kelompok perempuan telah dibedakan dengan istilah perempuan dalam pembangunan (*in women development*) dan perempuan dalam pembangunan (*women and development*) serta Gender dan pembangunan.

Pendekatan kesejahteraan ini didasarkan pada tiga asumsi dasar yaitu : wanita sebagai penerima pasif pembangunan, peran keibuan yang merupakan peranan yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat, dan mengasuh anak merupakan peranan perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Kritik yang diberikan untuk pendekatan ini ialah tidak menentang pembagian kerja secara seksual, bahkan memperkuat ideologi Gender yang memandang perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga serta menciptakan ketergantungan.

Pendekatan kesamaan mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif walau sumbangan tersebut sering tidak diakui. Dengan mengakui sumbangan ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketidaksejajaran perempuan terhadap laki-laki. Kritik yang diberikan kepada pendekatan ini berbunyi sebagai berikut : "Walau pendekatan ini berlaku untuk semua perempuan di semua negara, diperlukan pembelaan politik yang tangguh". Pembelaan politik ini sering kali tidak dimiliki oleh perempuan. Seandainya hak-hak resmi politik perempuan tersebut ada, dalam pelaksanaannya sering kali diabaikan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, lembaga-lembaga sosial,. Disamping itu pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri sendiri untuk memahami bagaimana bertindak dalam wilayah lingkungannya. Perubahan dimaksud harus berbasaskan kesadaran diri dari obyek pemberdayaan itu sendiri.

Sedang menurut Shardlow dalam Adi Rukminto (2003:54) pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Konsep pemberdayaan adalah perlunya perubahan, yang datang dari kesadaran sendiri. Keberhasilan pemberdayaan datang dari diri dan untuk diri sendiri dan lingkungannya. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah

penting bagi gerak akselerasi pembangunan demokrasi. Ali Murtopo dalam bukunya strategi kebudayaan menyebutkan akulturasi yang keempat yaitu akulturasi yang mencerminkan peradapan global dengan menempatkan ekonomi yang didukung secara kuat oleh ilmu dan teknologi, sebagai bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat baik secara kultural maupun institusional. Selanjutnya dalam proses pembangunan manusia yang berkesinambungan hendaknya tidak hanya memfokuskan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, namun pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang pro kaum miskin, petani, wanita dan demokrasi juga perlu mendapat perhatian.

Menurut Meriam Webster dan Oxford English Dictionary (IBID). Kata empower mengandung dua arti. Pengertian pertama *to give power or authority to*, dan pengertian kedua, *to give ability or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Tulisan ini lebih banyak akan mengartikan dalam konsep yang kedua.

Konsep tentang pemberdayaan telah ditelaah dalam berbagai tujuan. Pemberdayaan telah didefinisikan sebagai suatu proses (Pranarka dalam Sumaryadi, 2005) sebagai suatu strategi partisipasi (Mikkelsen dalam Sumaryadi 2005), dan sebagai suatu sumber. Pemberdayaan juga telah dipandang sebagai suatu strategi khusus untuk pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki. Pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sekedar dalam rangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Kiat pemberdayaan perempuan, walau sudah banyak dilakukan namun di beberapa kawasan gaungnya belum terasa bermanfaat. Dapat dikatakan bahwa hingga sekarang penyetaraan Gender belum membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Gender Mainstreaming merupakan strategi kesetaraan Gender yang dibuat untuk mengatasi masalah struktural dan kultural ini. Strategi ini berbeda dengan strategi sebelumnya, WID yang dikritik sebagai kurang sensitif terhadap perempuan dan berkelanjutan program. Strategi ini dapat juga dikatakan sebagai pematangan dari strategi yang dikembangkan sebelumnya, yang disebut sebagai *Gender and Development* (GAD) yang pada dasarnya menekankan pada pemberdayaan perempuan. Karena ketidakberdayaan bersifat struktural dan kultural, maka strategi ini menekankan pentingnya pembenahan kultur yang bias Gender.

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan menyoroti pemberdayaan perempuan dari berbagai perspektif sosial budaya, pendidikan, politik. Ditambah uraian seputar peranan perempuan Desa khususnya Desa Tegalsari di Kabupaten Jember dalam administrasi publik dalam kerangka kekuatan *civil society* untuk menunjang

kemandirian daerah.

Dalam spesifikasi Desa di Kabupaten Jember, pemberdayaan perempuan harus melihat pengaruh beberapa perspektif yang telah dikemukakan di atas. Ini disebabkan pola hidup orang Desa di Kabupaten Jember dalam keseharian banyak dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang ada di Jember. Orang Desa di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh budaya, agama yang dianut, struktur sosial dan pendidikan. Karena itu prospek pemberdayaan selanjutnya tidak lepas dari perspektif yang tersebutkan di atas. Syaratnya adalah penyelenggara pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat memahami arti positif pemberdayaan bagi perempuan Desa di Kabupaten Jember.

Konsep Gender

Pembicaraan tentang Gender sering disampaikan para ahli dan pemerhati perempuan. Ketika manusia dilahirkan isu perbedaan jenis kelamin menjadi tanda kehidupan masing-masing manusia dengan konsekuensi perbedaan tindakan dan katagori yang diakibatkan perbedaan jenis kelamin tersebut. Perbedaan jenis kelamin semacam itu menyebabkan perempuan menjadi sub ordinal laki-laki yang diciptakan dan digambarkan sebagai orang kuat, pelindung, dan sejumlah predikat lainnya. Kesadaran akan kesamaan hak dan derajat mulai muncul ketika adanya bukti bahwa laki-laki tidak dapat diharapkan lagi sebagai satu-satunya penopang keluarga, pengambil keputusan dan sejumlah dominasi kehidupan sosial.

Cara pandang yang membedakan perempuan dan laki-laki dari jenis kelamin akan merugikan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. (Naqiyah,2005 :52) Konsep Gender sebenarnya tidak akan membicarakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan eksistensi kodrati yang secara biologis tidak mungkin dipertukarkan karena ciptaan Tuhan yang tidak mungkin ditolak kehadirannya seperti misalnya : melahirkan anak, menyusui anak yang secara kodrati diakui eksistensinya sebagai hak dan kewajiban perempuan. Gender berbicara dari segi sosio kultural yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi diakui secara sosial maupun kultural misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Dengan demikian semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta dari suatu tempat ke tempat lain, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lain itulah yang dikenal dengan konsep Gender.

Pembicaraan telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep "Gender" digunakan sebagai perspektif. Gender lebih menunjukkan kepada relasi di mana laki-laki berinteraksi. Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan tetapi juga pada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam realita hidup perempuan. Konsep "perempuan" yang sebelumnya digunakan, cenderung mengisolasi perempuan dan laki-laki sehingga yang diperhatikan terhadap "sistem" dimana perempuan mengambil peran. Kecenderungan ini telah mengindikasikan

perkembangan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaan konsep gender yang sekaligus merupakan pendekatan dalam melihat kehidupan perempuan, telah memberikan informasi tentang tingkat perkembangan kualitatif yang terjadi. (Abdullah, 2003:23)

Dengan berbagai konsep di atas maka bisa difahami bahwa konsep Gender lahir dari perkembangan kehidupan perempuan itu sendiri yang sejak lahir sering dijadikan pihak yang ter subordinat. Konsep Gender secara kualitatif menginginkan suatu keadaan dimana perlakuan hak perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki secara kultural dan moral diakui secara wajar dan normal bagi perempuan.

Konsep Gender sama sekali tidak untuk menghilangkan eksistensi laki-laki sebagai orang kuat, rasional, perkasa atau menghilangkan eksistensi perempuan sebagai manusia lembut dan emosional. Eksistensi kultural tetap menjadi ciri masing-masing, bedanya terletak pada persamaan hak dan kewajiban antara keduanya tidak dipertentangkan dan masing-masing pihak sama berperan dalam penampilan dua wajah yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam realitas budaya desa di Kabupaten Jember yang seolah-olah tidak memberi peluang bagi perempuan untuk bertindak atas nama haknya, muncul pemikiran agar pemahaman budaya oleh orang-orang desa di Kabupaten Jember bukanlah pemahaman harfiah. Kebudayaan yang diciptakan dan secara tradisonal terwarisi pada orang desa di Kabupaten Jember harus difahami sebagai simbol kehidupan. Untuk terangkatnya hak perempuan perlu penelitian apakah budaya desa di Kabupaten Jember difahami secara harfiah atau sebenarnya budaya itu hanya simbol belaka. Karena itu peran aspek politik, sosial, ekonomi, religius, dan pendidikan dilihat sebagai alternatif pemberdayaan.

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah kecakapan dan kemandirian perempuan untuk meningkatkan kemandirian serta kekuatan dalam dirinya. Pemberdayaan perempuan meliputi :

a) Pemberdayaan pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan, langkah-langkah penting dalam pendidikan dan pelatihan bagi perempuan adalah :

1. Menjamin persamakan akses atas pendidikan.
2. Menghapus buta aksara diantara perempuan.
3. Memperbaiki akses wanita atas latihan ketrampilan, sains dan teknologi, serta pendidikan berkelanjutan.
4. Mengembangkan pendidikan dan latihan atas dasar non diskriminasi.
5. Mengalokasikan sumber dana yang cukup bagi implementasi dan monitoring bagi pembaharuan pendidikan.
6. Memajukan pendidikan dan pelatihan seumur hidup bagi anak perempuan dan perempuan.

b) Pemberdayaan ekonomi

Akses dan pengendalian bagi pendapatan bagi perempuan merupakan hal yang penting karena menyangkut otoritanya. Oleh karena itu penting bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan sendiri, yang memungkinkan untuk mengatur dan mengontrol masalah keuangannya sendiri.

c) Pemberdayaan psikologis

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir perempuan. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali perempuan dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkannya dari hidup ini.

d) Pemberdayaan sosial budaya

Menekankan adanya keharmonisan peran dalam rumah tangga, lingkungan sosial, lingkungan kerja dan lingkungan politik.

e) Pemberdayaan politik

Perlu peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pemberdayaan politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat.

Menurut Friedmann dalam Prijono (1996) yang penting dan perlu diperhatikan bagi pemberdayaan perempuan adalah :

- 1 Menghemat waktu dalam menyelesaikan rumah tangga, seperti untuk mendapatkan air, dan bahan bakar yang mudah, memperoleh peralatan dapur yang lebih baik/canggih, tersedianya akses bagi fasilitas masyarakat, yayasan penitipan bayi dan anak, angkutan umum dan jasa yang memadai.
- 2 Memperbaiki pelayanan kesehatan, termasuk penerangan keluarga berencana dan mempunyai akses atas pelayanan dan menggunakan peralatan secara murah.
- 3 Menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas perempuan seperti belajar membaca, cara meningkatkan kebersihan diri, gizi, bercocok tanam, serta memperoleh informasi mengenai pelayan khusus bagi perempuan.
- 4 Memperluas kesempatan meningkatkan pendapatan yang berasal dari hasil bumi, peternakan, atau hasil usaha lainnya yang menjamin perempuan dapat mengontrol / mengendalikan pendapatannya sendiri.

Meskipun beragam faktor yang melatar belakangi pemberdayaan dan berbagai gejala penyebab ketidakberdayaan perempuan, khususnya perempuan desa termasuk miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya tetapi dalam realita komunitas masyarakat tertentu justru mereka diberi kesempatan untuk dapat memainkan perannya sebagai insan yang memiliki potensi untuk dapat diunjuk kerjakan.

Strategi Pemberdayaan

Pemahaman yang keliru tentang pemberdayaan sering juga mempengaruhi strategi yang ingin diterapkan dalam proses pemberdayaan. Seperti telah diuraikan di

atas bahwa pemberdayaan menyangkut dua kecenderungan. Kecenderungan pertama (primer) proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu maupun kelompok menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Sedangkan kecenderungan kedua (sekunder) menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kecenderungan kedua dari pemberdayaan ini lebih banyak melihat kedalam diri kita sendiri, serta menemukannya kekuatan yang ada pada diri kita. Dengan mengetahui dua kecenderungan pemberdayaan seperti di atas setidaknya bisa dirancang strategi pemberdayaan. Dari uraian tersebut bisa dilihat dalam pemberdayaan ada dua kelompok yang memberdayakan serta kelompok lain yang diberdayakan. Untuk memberdayakan kelompok yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya maka diperlukan strategi.

Strategi sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan, dalam pemberdayaan strategi lebih banyak membicarakan bagaimana kelompok yang belum berdaya menjadi lebih berdaya. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti ideal ini, akan tetapi setidaknya kita dapat menawarkan alternatif agar strategi pemberdayaan bisa mencapai tujuan. Inti dari strategi pemberdayaan adalah naiknya daya tawar orang atau kelompok yang belum berdaya.

Strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat elemen dasar dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu kekuasaan dan politik. Hal ini penting diketahui karena kekuasaan (power) menyangkut kapasitas atau kemampuan bertindak, baik secara personal maupun kolektif untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Penggunaan kekuasaan secara efektif sangatlah penting dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Guna mencapai strategi yang baik sekali lagi ditekankan akan pentingnya kerja sama melalui negosiasi maupun dialog antara dua kelompok seperti tersebut di atas, karena merancang strategi di atas bukan masalah kalah menang akan tetapi lebih menekankan bagaimana kedua kelompok tersebut bisa bersinergi. Sehingga tidak ada kesan bahwa kelompok satu merasa menang atau dirugikan oleh kelompok yang lain. Apabila ini bisa dilaksanakan maka rancangan strategi pemberdayaan sudah berhasil.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Menurut hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi

lujur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Kesejahteraan keluarga dalam kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara materiail, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Tujuan dari Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi lujur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Sasaran dari Gerakan PKK adalah keluarga baik di perkotaan maupun di pedesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang :

1. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh suatu cerita tentang apa yang tersembunyi dibalik upaya pemberdayaan perempuan desa melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selanjutnya, bentuk yang dipilih dalam penelitian ini adalah “studi kasus”. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam, terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian lapangan, peneliti akan mengumpulkan sejumlah informasi tentang pemberdayaan perempuan desa melalui kegiatan PKK dari Desa Tegalsari secara mendalam dan mendetail agar peneliti dapat menemukan dan menggambarkan berbagai aspek tindakan, sikap, perasaan, dan kata-kata tentang program PKK Desa dalam pemberdayaan perempuan di desa Tegalsari untuk menunjang kesejahteraan keluarga,

strategi yang dilakukan PKK desa Tegalsari dalam program pemberdayaan perempuan desa.

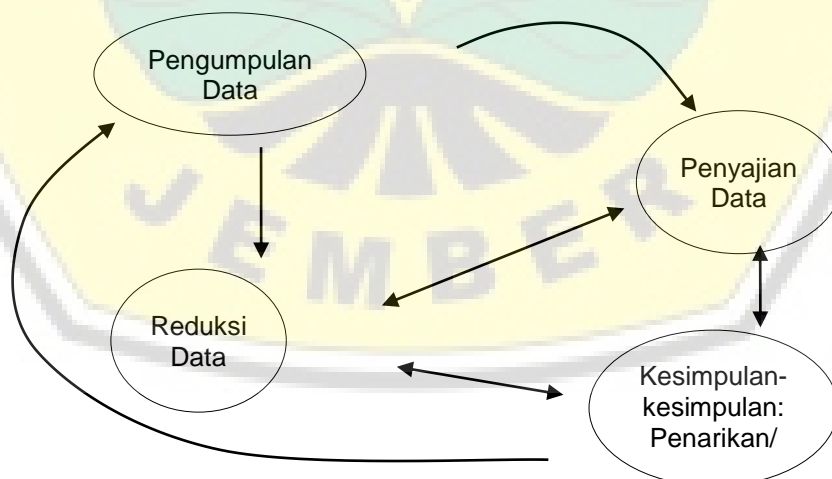
Penelitian ini dilakukan di desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Lokasi tersebut memiliki kekhasan tersendiri khususnya kaum perempuan baik yang menjadi pengurus maupun anggota PKK Desa, dimana selain sebagai ibu rumah tangga, mereka aktif dalam memberdayakan dirinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh PKK di desanya, dalam melaksanakan perannya dalam turut mensejahterakan keluarganya. Selain itu karena keberagaman penduduk, hal ini memudahkan penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Dan penulis berdomisili tidak jauh dari tempat lokasi penelitian sehingga dapat menekan waktu dan dana penelitian.

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan perempuan di Desa Tegalsari melalui PKK Desa.
2. Strategi yang dilakukan PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan program pemberdayaan perempuan desa.

Informan yang dipilih adalah pengurus dan anggota PKK Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, informan awal adalah ketua dan wakil Tim Penggerak PKK Desa Tegalsari yang menjadi penggerak dalam organisasi, informan selanjutnya para pengurus, kader, anggota, masyarakat lainnya. Penggunaan tehnik ini baru dihentikan apabila data yang diperoleh dianggap jenuh atau fenomena yang diteliti sudah tidak berkembang lagi sehingga sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Sistem kerja menggunakan teknik analisis data model interaktif tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1 : Analisis Data Model Interaktif.



Sumber : Miles dan Huberman, 1992

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sarana Pendidikan, Kesehatan, dan Agama

a. Sarana Pendidikan

Sebagai penunjang kegiatan pendidikan dasar hingga atas di Desa Tegalsari terdapat sarana pendidikan sebagai berikut : mulai dari lembaga pendidikan PAUD - SLTP Walaupun sarana pendidikan di Desa Tegalsari cuma sampai jenjang SLTP, namun penduduk tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi baik, SLTA bahkan perguruan tinggi ke luar desa atau luar kota bahkan ada yang di luar negeri. Lembaga pendidikan nonformal juga ada diantaranya TPA, TPQ, Taman Bacaan masyarakat, lembaga kursus ada kursus menjahit, mebeler, dsb demi mendukung masyarakat gemar belajar.

b. Sarana Kesehatan

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk Desa Tegalsari dalam menyongsong Ambulu Sehat Tahun 2015 maka di Desa Tegalsari ada berbagai sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan di bidang kesehatan. Sarana yang ada yakni mulai adanya Polides, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, dan sebagainya. Dari beberapa sarana kesehatan tersebut tentu diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan baik sebagai tenaga medis ataupun sebagai tenaga kader kesehatan.

c. Sarana Agama

Penduduk Desa tidak hanya heterogen dari aspek pendidikan dan mata pencaharian, dari aspek agama juga heterogen, maka di Desa Tegalsari ditunjang dari berbagai sarana peribadatan. Namun mayoritas masyarakat adalah agama islam, sebagai mayoritas memang nampak jelas bahwa kegiatan yang bernafaskan Islam seperti pengajian, yasinan, mengaji, dan sebagainya. Kegiatan pengajian biasanya dilaksanakan seminggu sekali demikian juga dengan kegiatan yasinan dan sebagainya

Profil Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tegalsari

Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur telah banyak dikenal berbagai masyarakat Jawa. Karena desa ini merupakan desa migrasi konon dari asal ceritanya berasal dari kabupaten ponorogo dan sekitarnya. Kehidupan masyarakatnya selalu dinamis dan ingin maju, hal ini terlihat dari banyaknya sarana dan prasarana desa yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat poskamling, balai kasun, dsb. Demikian pula dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan diantaranya adalah lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa. Lembaga PKK Desa Tegalsari adalah merupakan salah satu wadah perempuan Desa Tegalsari untuk memberdayakan dirinya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai mitra kerja pemerintah dengan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah diprogram dan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Terbentuknya lembaga PKK Desa Tegalsari ini sejak tahun 1999 sejalan dengan Desa Tegalsari ditetapkan sebagai desa definitif.

Tujuan dari gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Misi

a. Meningkatkan mental spiritual, pelaksanaan HAM, demokrasi, kesetiakawanan sosial, dan gotong royong.

b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

c. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta kehidupan yang berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

Dalam perjalanannya beberapa prestasi pernah diraih oleh PKK Desa Tegalsari kecamatan Ambulu memperoleh sejumlah prestasi yang cukup membanggakan sekali sehingga bisa memberikan nama baik kecamatan Ambulu dan juga nama baik untuk kabupaten Jember.

PKK Desa Tegalsari yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi wadah pemberdayaan perempuan sudah memiliki kegiatan rutin terutama dalam pelaksanaan program kerja. Kegiatan tersebut dijadwalkan berdasarkan atas kesepakatan bersama, untuk mempermudah dan menertibkan pengurus, kader, dan anggota PKK Desa menjalankan tugasnya. Tanpa pemberitahuan dalam bentuk apapun, kalau jadwal kegiatan tiba mereka berbondong-bondong mendatangi tempat kegiatan, baik mereka menjadi pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan. Sesuai dengan prinsip dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan, maka sumber pembiayaan kegiatan PKK didasarkan pada swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah dan bantuan sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan prinsip pembangunan dan pemberdayaan tersebut diatas maka kegiatan PKK Desa Tegalsari dibiayai oleh swadaya pengurus dan anggota, partisipasi masyarakat, didukung peran serta PKK Kabupaten Jember.

Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Tegalsari Melalui PKK Desa

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tegalsari adalah gerakan pembangunan masyarakat khususnya perempuan yang tumbuh dari bawah bertujuan untuk mewujudkan keluarga-keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, yang memiliki

prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sebagai wadah pelaksanaan pemberdayaan perempuan desa berbagai pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan.

Pemberdayaan perempuan desa yang dilaksanakan oleh PKK Desa Tegalsari mencakup berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Kesehatan

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan suatu kegiatan dalam bidang kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat guna menyelenggarakan 5 kegiatan pelayanan dasar (KB, Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, Gizi, Imunisasi, Penanggulangan diare, dan ISPA) yang keberadaannya ada dalam kelompok-kelompok masyarakat. Posyandu balita di Desa Tegalsari dibentuk sejak tahun 1999, yang sekarang berjumlah 4 posyandu.

Tujuan dari Posyandu diantaranya adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kegotong-royongan masyarakat serta sebagai tempat untuk saling memperoleh dan memberikan informasi terutama dalam bidang kesehatan. Sasaran dari Posyandu adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, Wanita Usia Subur (WUS), dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Kegiatan yang dilakukan Posyandu yang berupa pelayanan gizi yang dilakukan adalah usaha posyandu dalamantisipasi kasus kekurangan gizi pada masyarakat terutama mereka yang rentan. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status gizi anak balita, ibu hamil, serta perempuan menyusui. Disini juga Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita seperti bubur kacang hijau, bubur ayam, dsb.

Imunisasi diberikan pada ibu hamil, dan anak bayi sampai balita. Pada ibu hamil atau pasangan usia subur diberikan imunisasi Tetanus Toxoil (TT). Sedang pada bayi dan balita diberi imunisasi BCG, DPT, HB, Polio dan Campak.

Untuk pelayanan KB meliputi penyuluhan tentang KB, Konsultasi tentang KB, dan pembagian atau penjualan alat kontrasepsi. Jadi selain mendapatkan informasi tentang KB, perempuan Desa Tegalsari juga dapat mengakses pelayanan KB dalam melaksanakan posyandu sehingga lebih efisien dari pada mengakses pelayanan KB ke PUSKESMAS atau tenaga medis yang ada.

Mengingat besarnya peranan Posyandu dalam masyarakat baik bagi para ibu (perempuan) atau pada masyarakat pada umumnya, maka keteraturan pelaksanaan Posyandu sangat diperlukan. Posyandu dilaksanakan setiap sebulan sekali. Upaya pemberdayaan perempuan dalam Posyandu terlihat dalam kader-kader yang terdiri dari perempuan yang terlatih dan terlibat dalam setiap kegiatan Posyandu yang sudah dilatih tentang bagaimana proses pemberian pelayanan kepada sasaran. Mereka sudah dididik tentang pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), penyuluhan upaya gizi keluarga, pencegahan diare, penimbangan balita yang benar, dan pengetahuan tentang alat kontrasepsi KB.

Kegiatan Posyandu lansia juga dilaksanakan di Desa Tegalsari, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Salain itu sebagai ajang sosialisasi atau pertemuan antar lansia sehingga dapat berbincang dan saling bertukar pikiran

sehingga tidak stress dalam menjalani hari-hari tuanya. Sasarannya adalah orang-orang yang sudah berumur 55 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan. Posyandu lansia dibentuk sejak tahun 2002 dengan dana swadaya masyarakat. Kegiatan Posyandu lansia adalah penimbangan dan pengukuran tinggi badan, pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah, penyuluhan gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti juga bubur kacang hijau, susu dan telur, bubur ayam, dll.

Selain hal tersebut diatas juga dilaksanakan senam lansia, juga dalam rangka menjaga kesehatan lanjut usia. Program tersebut diatas merupakan wujud nyata dari pemberdayaan perempuan, karena perempuan mempunyai peran penting baik sebagai kader kesehatan yang terlatih dan terlibat secara aktif dalam memfasilitasi setiap kegiatan maupun warga perempuan yang berpartisipasi sebagai peserta. Dengan tetap eksisnya pelaksanaan Posyandu balita dan posyandu lansia maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan di Desa Tegalsari sudah berjalan dengan baik, sudah sampai pada kesadaran mandiri (diri sendiri) akan pentingnya keterlibatan dalam bidang kesehatan. Keterlibatan bukan hanya sebagai penerima program (kelompok sasaran) tetapi lebih jauh terlibat dalam pelaksanaan program secara aktif.

Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan tanggung jawab POKJA II, kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang ekonomi keluarga ini diantaranya adalah melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang pendiriannya sejak tahun 1999 binaan dari BKKBN.

Dalam perkembangannya karena merasa anggotanya semakin besar, semua pengurus adalah ibu rumah tangga, yang mempunyai wawasan ke depan dalam membangun usaha, yang lebih dulu harus ditumbuhkan adalah jiwa wiraswasta. Pengembangan Usaha Kelompok UPPKS adalah merupakan kelompok usaha ekonomi produktif berbasis produk anggota. Artinya bahwa semua anggota kelompok mempunyai kesempatan dalam pengembangan usaha sehingga keragaman usaha inilah yang membuat kelompok UPPKS semakin dinamis dan berkembang.

Jenis usaha yang dikembangkan adalah sebagai berikut; usaha Kelompok (simpan pinjam dan jasa) sedangkan usaha anggota (dagang sembilan bahan pokok, Produk jamu gendong, Menjahit pakaian, Produk kue kering, Produk minuman sehat, Produk ramuan sehat).

Program tersebut diatas merupakan wujud nyata dari pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Karena pengurus maupun anggota kelompok yang terlibat secara aktif dalam segala kegiatan kelompok dalam rangka usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui kelompok UPPKS yang secara kelembagaan bergerak di bidang ekonomi dalam rangka membantu keluarga meningkatkan penghasilan tambahan.

Dengan melihat kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di Desa Tegalsari melalui kelompok UPPKS tidak semuanya berjalan dengan baik. Walaupun sudah ada kesadaran secara

mandiri akan pentingnya keterlibatan dalam bidang ekonomi ini, keterlibatan bukan hanya sebagai penerima program, namun terlibat dalam proses yang dilakukan kelompok dari pengorganisasian, permodalan, pengembangan produk, sampai pengembangan pasar.

Bidang Pendidikan

Pemberdayaan harus dimulai dari diri kita masing-masing dimana pendidikan merupakan faktor kunci, untuk itu Tim Penggerak PKK Desa Tegalsari beserta kader-kadernya sebagai sarana pelaksana program maupun sasaran program harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan perannya secara maksimal, kegiatannya meliputi :

A. Mengikuti pelatihan kader

PKK Desa Tegalsari selalu memberi kesempatan kepada kadernya untuk mengikuti pelatihan kader Posyandu, pelatihan kader BKB, pelatihan kader PAUD, pelatihan keterampilan untuk kelompok UPPKS yang dilaksanakan baik di desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi.

BKB merupakan bentuk kegiatan dimasyarakat yang merupakan upaya strategis dalam mengembangkan konsep keluarga kecil mandiri dan sebagai peningkatan mutu SDM sejak usia dini. Oleh karena itu diperlukan kader-kader yang terlatih sebagai pelaksana kegiatan dengan mengikuti pelatihan kader BKB yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Jember bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Jember, TP PKK Kecamatan Ambulu.

PAUD merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas anak sejak usia dini. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Sejalan dengan tujuan dari kegiatan PAUD maka harus dilaksanakan oleh kader-kader yang terlatih dalam pengelolaannya. Pelatihan merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan kemampuan dalam pengelolaan PAUD yang biasanya disebut pengasuh.

Pelatihan kader PAUD diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Jember. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Pendidikan dengan mengenal motorik anak dan menggunakan alat-alat bantu seperti gambar binatang;
- b. Pengetahuan tentang gizi anak;
- c. Pengetahuan tentang pengasuhan anak;
- d. Pengetahuan tentang pertumbuhan anak.

Program BKB yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan di masyarakat merupakan upaya strategis dalam membina dan mengembangkan konsep keluarga kecil mandiri dan sebagai bagian dari peningkatan mutu Sumber Daya Manusia sejak usia dini. Kegiatan pemberdayaan keluarga melalui pembinaan mental, karakter, dan kecerdasan anak semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan perempuan bidang pendidikan di Desa Tegalsari, karena perempuan mempunyai peran penting baik

sebagai kader maupun sebagai sasaran kegiatan telah terlibat aktif dalam segala kegiatan dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kader-kader PAUD, kelompok BKB, yang secara kelembagaan bergerak di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Desa Tegalsari juga sudah berjalan dengan baik. Sudah ada kesadaran secara mandiri akan pentingnya keterlibatannya dalam bidang pendidikan bukan hanya sebagai sasaran kegiatan tetapi juga terlibat dalam proses pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan desa Tegalsari sudah dapat memberdayakan dirinya di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Bidang Politik

Perempuan bukan cuma dituntut untuk memiliki peran domestik yaitu sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, namun juga harus memiliki peran publik sebagai bagian dari bagian masyarakat. Peran politik tidak harus menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif, sebagai anggota masyarakat biasa perempuan juga dapat melaksanakan perannya misalnya dengan terlibat dalam pengambilan keputusan publik, misal dalam rapat desa PKK Desa juga diikutkan, masuk BAPEPDES, aparat desa dan malah dari Tim Penggerak PKK Tegalsari ada yang menjadi anggota organisasi Perempuan Peduli Jember yang bergerak di bidang politik. Untuk ditingkat desa sudah dibentuk organisasi politik perempuan Kartini namun aktifitasnya belum begitu menonjol, sebagai tindak lanjut dari pendidikan politik yang mereka peroleh di kabupaten, yaitu program tata pemerintah Tanggap Gender kerja sama ADB (*Asian Development Bank*) dengan pemerintah daerah kabupaten Jember tahun 2005. PKK Desa Tegalsari diberi kesempatan untuk mengirim kadernya mengikuti pelatihan ini.

Materi pelatihan dalam program tata pemerintahan tanggap gender adalah meliputi: pendidikan kewarganegaraan yang memuat tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai warga negara. Dan penyusunan anggaran yang tanggap gender untuk membekali peserta memiliki kemampuan menyusun program-program yang tanggap gender di tempat kegiatan masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari mengikuti program pelatihan tata pemerintahan tanggap gender, dibentuklah organisasi wanita Kartini. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyebar luaskan materi yang diperoleh pada pelatihan tata pemerintahan tanggap gender dan wadah perempuan untuk menyampaikan aspirasinya bidang kepentingan publik di desa. Namun sayang dalam perkembangannya organisasi ini mati suri tanpa aktifitas apapun.

Strategi PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan Desa

Pemberdayaan perempuan yang berwawasan gender dalam Pembangunan Daerah harus masuk dan terintegrasi pada setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat besarnya jumlah perempuan dan pentingnya peran serta perempuan dalam Pembangunan Daerah. Perempuan sebagai potensi yang besar baik sebagai anggota keluarga yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus bangsa maupun perempuan sebagai agen pembangunan yang memerlukan ruang gerak yang lebih luas di segala bidang (bidang sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum dll). Mereka bukan hanya sebagai objek dalam pemberdayaan tetapi perlu dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program.

Bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat khususnya perempuan dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan PKK, karena program dan kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan yang perlu terus menerus dipacu seiring dengan dinamika pembangunan.

PKK Desa Tegalsari sebagai salah satu wadah pelaksanaan pemberdayaan perempuan Desa harus selalu menata diri, perlu diimbangi dengan kesiapan Tim Penggerak PKK baik kelembagaan, program, dan administrasi dengan dukungan dana, sarana yang memadai, maupun kesiapan sumber daya manusianya.

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan PKK Desa Tegalsari harus berbenah diri, untuk membuka diri, dan mencari mitra kerja yang dapat bekerja sama dalam rangka pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan.

Wadah pemberdayaan perempuan Desa Tegalsari selalu bergerak dinamis. Banyak hal yang telah dilaksanakan diantaranya adalah dimulai dari pembenahan kelembagaan yang harus didasarkan kepada kebutuhan pengembangan bidang-bidang strategi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dirumuskan dalam program kerja. Dimensi dalam penguatan kelembagaan PKK Desa Tegalsari meliputi:

1. Pengembangan Program

Dalam rangka pengembangan program selain dalam rangka memperbaiki kualitas program-program yang sudah ada seperti program Posyandu balita, Posyandu lansia, UPPKS, BKB, dll. Dengan persediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mutu layanan yang bagus. Selain itu mengembangkan program baru yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Bacaan Masyarakat dan Kelompok Politik Perempuan.

2. Menjalinkan kemitraan dengan pihak lain seperti dengan pemerintah daerah dari tingkat propinsi sampai tingkat desa melalui instansi terkait (BKKBN, DINKESOS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll). Pihak swasta seperti lembaga keuangan misal BPD Jember, masyarakat, PKK Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan kerjasama baik di bidang teknis, keterampilan, permodalan dan pemasaran, pameran, dan perlombaan.

3. Pengembangan Manajemen.

Segecap pengurus Desa Tegalsari didorong untuk mencari dan menggunakan cara-cara pengelolaan kegiatan dengan metode serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Untuk itu proses manajemen sudah dimulai sejak perencanaan program kegiatan. Program kerja untuk kurun waktu satu tahun, yang terbagi program umum seperti BKB, Gotong Royong, Posyandu. Sedang program prioritas seperti PAUD dan UPPKS.

4. Pengembangan Budaya Organisasi

Dalam rangka pengembangan budaya organisasi mereka membuat aturan yang disepakati bersama dan harus dipatuhi sama pengurus dan anggota. Menekankan budaya demokrasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Transparansi dalam pengelolaan setiap kegiatan baik bagi pengurus maupun anggota organisasi. Mengutamakan kemandirian dan gotong royong dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Hal juga penting dilakukan PKK Desa Tegalsari adalah pengembangan Sumber Daya Manusianya baik pengurus maupun kader-kadernya. karena dilandasi atas kesadaran bahwa masyarakat yang dilayani selalu bergerak dan berkembang dinamis. Karena tingkat pendidikan semakin tinggi, sehingga mutu dan tingkat pengetahuan pengurus dan kader PKK harus dikembangkan terus-menerus. Mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kader BKB, pelatihan kader Posyandu, pelatihan kader UPPKS, pelatihan keterampilan seperti menjahit, pengeringan biji dan buah, pelatihan dan pengelolaan PAUD. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten melalui Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, dan PKK Kabupaten dan Kecamatan.

Pembahasan

Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Tegalsari

Berbagai program kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh PKK Desa Tegalsari pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga-keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Hal ini disebabkan adanya tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan semakin kompleks, yaitu tuntutan kebutuhan pendidikan, kebutuhan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, kebutuhan untuk menikmati perkembangan dalam teknologi, informasi maupun dalam bidang sosial budaya lainnya seperti hiburan yang ingin dipenuhi. Kesejangan antara tuntutan kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan kemampuan untuk memperolehnya yang menjadikan para perempuan desa merasa berkewajiban untuk membantu keluarga dalam memperkecil kesenjangan tersebut.

Pada dasarnya manusia memiliki potensi dan daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Maka menurut Kartasmita dalam Sumaryadi (2005) hakekat dari pemberdayaan tersebut adalah berada dalam diri manusia itu sendiri sedangkan faktor diluar diri

manusia menjadi faktor stimulus, perangsang munculnya semangat, dorongan, atau motivasi pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan wanita dalam pembangunan /*Women in development* antara lain dikaji oleh Monser dalam Naqiyah (2005), yakni mengemukakan lima pendekatan sebagai berikut: (1) Pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*), (2) Pendekatan keadilan (*the equiting approach*), (3) Pendekatan pengentasan kemiskinan (*the anti poverty approach*), (4) Pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*), (5) Pendekatan pemberdayaan

Program kegiatan pemberdayaan perempuan desa melalui PKK Desa Tegalsari dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pada tiga asumsi dasar yaitu : (a) wanita sebagai penerima pasif pembangunan, (b) peranan yang paling penting bagi perempuan adalah peran keibuan, (c) dalam aspek pembangunan ekonomi, mengasuh anak merupakan peranan perempuan yang paling efektif. Ketiga asumsi dasar ini tidak lagi berkenaan dengan perilaku kehidupan perempuan di Desa Tegalsari terutama yang menjadi pengurus, kader, dan anggota PKK Desa. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan dimana berdasarkan deskripsi data yang telah diperoleh bahwa kaum perempuan sudah memulai memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas hidup rumah tangga baik dari demensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan politik. Sedang pendekatan tersebut diatas mencerminkan ketergantungan kaum perempuan terhadap pria dimana perempuan hanyalah dianggap sebagai pendamping suami dalam mengurus rumah tangga.

Perspektif pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan pendekatan kesejahteraan menganggap peranan perempuan yang efektif hanya mengasuh anak. Mengarah bagaimana mempersiapkan manusia-manusia yang berkualitas di masa yang akan datang termasuk didalamnya menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Namun belum menunjukkan secara langsung perannya dalam meningkatkan ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendekatan kesejahteraan dengan tiga asumsi pada dasarnya tidak relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan peradaban perempuan pada saat ini.

Kedua, pendekatan persamaan. Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan melalui kerja produktif. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mulai menyadari akan ketergantungan tersebut. Sehingga muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK Desa. Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa dengan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga dapat menjadikan kaum perempuan mulai sejajar dengan pria. Atau dengan kata lain, bahwa pendekatan ini bertujuan menjelaskan perempuan dari yang sifatnya tergantung menuju ke arah kemandirian. *Ketiga*, pendekatan anti kemiskinan. Pendekatan ini sebenarnya hampir sama dengan pendekatan kesamaan tersebut diatas. Perbedaannya hanyalah

terletak pada kehalusan arti. Dimana pendekatan kesamaan cenderung mengarah pada tuntutan persamaan hak dan kewajiban. Sedang pendekatan anti kemiskinan sarannya adalah bagaimana memerangi kemiskinan. *Keempat*, pendekatan efisiensi. Pendekatan ini menjelaskan tentang pergeseran dari perspektif perempuan menuju pada perspektif pembangunan. Pergeseran ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa dalam upaya peningkatan ekonomi, partisipasi perempuan di negara dunia ketiga secara otomatis berkaitan. Maksudnya adalah munculnya pendekatan efisiensi ini karena sering terjadi pemborosan yang disebabkan oleh pemusatan perhatian hanyalah pada peningkatan kesamaan antara perempuan dan pria sedangkan perhatian pada pembangunan itu sendiri terabaikan. Kenyataan inilah yang menjadi perhatian pembangunan terfokus pada pembangunan itu sendiri, sehingga faktor-faktor yang menjadi penyebab pemborosan tersebut harus dihilangkan.

Kajian yang ditempuh dalam pendekatan efisiensi ini muncul akibat banyak perempuan mulai tergeser dari pasar tenaga kerja dan diganti teknologi yang pada umumnya dikuasai oleh pria. Kenyataan ini disebabkan oleh perempuan yang masuk dalam pasar tenaga kerja lebih besar bersifat politis dimana hanya menjaga dan menjunjung kesamaan tanpa memperhatikan kualitas pekerja itu sendiri. Pada saat yang bersamaan juga, muncul suatu ideologi tentang perempuan, bahwa perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Pendekatan efisiensi ini menjadikan perempuan seolah-olah kembali pada pendekatan pertama. Berdasar deskripsi data penelitian ini, ditemukan bahwa sejak adanya PKK Desa Tegalsari tidak menunjukkan *uneffisiensi* yang mengorbankan perempuan yang terjadi malah sebaliknya semakin berkembangnya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakannya. Sehingga semakin banyak melibatkan perempuan desa baik sebagai pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan.

Pendekatan *kelima* yaitu pendekatan pemberdayaan, menekankan pada fakta bahwa perempuan mengalami penekanan (*oppression*) yang berbeda menurut bangsa, kelas, sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian wanita tetap harus pantang struktur dan situasi yang menekankan secara bersama pada ikatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya wanita untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan keberdayaannya bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang akan diperoleh wanita akan merupakan kehilangan bagi laki-laki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan dan kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self – reliance*) serta kekuatan dalam dirinya (*Internal Strength*).

Pemberdayaan seperti tersebut diatas bukan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat desa Tegalsari karena faktor-faktor yang dimunculkan akibat dari pemberdayaan itu telah dipraktekkan oleh perempuan desa. Yang dimaksud pemberdayaan menurut PKK Desa Tegalsari dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan masing-masing agar PKK desa Tegalsari dapat lebih berfungsi sebagai wahana untuk membantu perempuan desa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Prijonodalam Fakhri (1999:78) bahwa pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan pendidikan, psikologis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci pemberdayaan masyarakat yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan lainnya. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan dan produktivitas.

Fenomena yang telah ditemukan dalam melihat kegiatan program pemberdayaan perempuan desa melalui PKK Desa Tegalsari bahwa telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan. Diantaranya adalah pemberdayaan pendidikan, yang merupakan faktor kunci dari pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan yang ditunjang dan dilengkapi pemberdayaan lainnya.

Pada umumnya secara kuantitatif jumlah perempuan terdidik semakin meningkat dan jumlah perempuan buta aksara makin berkurang. Jumlah perempuan yang sekolah meningkat mulai dari pendidikan dasar ke pendidikan tinggi, walau makin tinggi tingkat pendidikan makin kecil jumlah perempuannya. Meskipun jumlah perempuan terdidik bertambah secara kuantitatif, tetapi dalam kenyataannya sering kali perempuan tidak mendapat akses pendidikan dan latihan, antara lain sebagai akibat *stereotype* dan prasangka negatif terhadap perempuan. Terdapat konsensus bahwa perempuan yang menerima pendidikan, maka akan diperoleh beberapa keuntungan yang lebih signifikan.

- a. Seorang ibu yang terdidik dapat membesarkan keluarga yang lebih sehat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan mengenai gizi, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian angka kematian anak antara umur satu hingga lima tahun makin kecil.
- b. Wanita terdidik cenderung memiliki jumlah anak sedikit sehingga dapat memperlambat pertumbuhan jumlah penduduk.
- c. Perempuan terdidik lebih produktif, baik di rumah maupun di tempat kerja.
- d. Perempuan terdidik cenderung membuat keputusan lebih independen dan bertindak untuk dirinya sendiri.
- e. Perempuan jika terdidik cenderung untuk mendorong anak-anaknya menjadi terdidik. (United Nations dalam Roqib 2002)

Jika pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat, mengapa masih ada perempuan yang tidak berpendidikan? Salah satunya karena faktor ekonomi, pendidikan membutuhkan biaya karena ada peralatan dan seragam sekolah yang harus dibeli. Selain itu jika anak perempuan pergi sekolah kemungkinan tidak adanya bantuan kerja di rumah atau tempat kerja seperti sawah dan pasar. Faktor sosial dan budaya juga penting, di banyak masyarakat tradisional masih terdapat sikap keluarga atau masyarakat yang tidak menyetujui jika perempuan berpendidikan tinggi. Bahkan pada umumnya seorang suami kurang menyetujui jika istrinya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari dirinya. Bagi perempuan dewasa masalahnya lebih kompleks, sering kali mereka harus bekerja seharian untuk dapat memenuhi kelangsungan dan kebutuhan hidup keluarganya.

Dari hasil penelitian di lapangan, bahwa keluarga antara masyarakat desa Tegalsari sangat mendukung jika perempuan berpendidikan tinggi. Sehingga perempuan

desa Tegalsari dapat mengakses kelas latihan-latihan keterampilan seperti menjahit, pengeringan biji-bijian, latihan-latihan kader seperti kader posyandu, kader BKB, kader PAUD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Hal ini terjadi karena didukung oleh faktor sosial budaya yang berlaku di Desa Tegalsari. Masyarakatnya termasuk masyarakat yang modern, sehingga mereka selalu membuka akses untuk kemajuan masyarakat dan desanya. Hal ini dilatarbelakangi bahwa penduduk Desa Tegalsari bukan penduduk asli mereka merupakan pendatang. Dengan demikian faktor ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa Tegalsari sangat mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan desa di bidang pendidikan.

Di samping pemberdayaan pendidikan, juga dilakukan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di Desa Tegalsari. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang ekonomi keluarga ini diantaranya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Bidang usaha dari kelompok UPPKS ini adalah simpan pinjam, yang dapat dijadikan sarana lembaga ekonomi desa maupun sarana lembaga keuangan desa, yang anggotanya dapat mengakses kredit dengan mudah dan murah sebagai modal usahanya. Jenis usaha UPPKS di Desa Tegalsari adalah dagang sembilan bahan pokok, produk jamu gendong, produk kue kering, minuman sehat dan ramuan sehat dari mahkota dewa, dan menjahit. Yang pemasarannya ditingkat lokal, regional, dan nasional.

Akses dan pengendalian atas pendapatan bagi perempuan merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya. Oleh karena itu penting bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan sendiri, yang memungkinkan baginya untuk mengatur dan mengontrol masalah keuangan sendiri. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan memasuki lapangan kerja dengan tujuan memperkaya dirinya secara ekonomi, misalnya dalam melakukan kerja sosial, ini merupakan aktualisasi atau pengembangan diri. Walaupun dalam kenyataan banyak perempuan mencari kerja untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, membiayai pendidikan dan keperluan keluarganya.

Kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di Desa Tegalsari belum berjalan dengan maksimal. Karena kurangnya dukungan modal, teknologi, dan pasar diperlukan dari pihak pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mampu menjadi katalisator dan mediator supaya perempuan Desa Tegalsari yang tergabung dalam kelompok UPPKS dapat mengakses modal, teknologi, dan pasar dalam memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki.

United Nations dalam Roqib, (2002) menyatakan perlu meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Untuk itu pemberdayaan perempuan di bidang politik diperlukan, untuk menjamin kesamaan akses perempuan atas partisipasi penuh dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Kepemimpinan dalam konteks pemberdayaan politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan

pekerjaan banyak orang dalam masyarakat (Tandala Prijono dan Pranarka, dalam Wiyoto (2005). Dalam proses pemberdayaan politik seorang pemimpin, khususnya perempuan perlu memiliki bekal kepemimpinan. Sebagai pemimpin perempuan harus mampu menggerakkan dan membuat perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Seorang pemimpin perempuan juga perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang didukung oleh kemauan dan keberanian dengan menggunakan kesempatan untuk menjadi teman seperjuangan lelaki. Pemimpin perempuan juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya sehingga dapat menampung aspirasi dan keinginan masyarakat serta mengantisipasi kemungkinan kesalahan yang timbul.

Pemberdayaan perempuan di bidang politik di Desa Tegalsari sudah dilakukan meskipun belum ditaraf arena lembaga politik dan lembaga kenegaraan. Namun sebagai anggota masyarakat biasa perempuan desa Tegalsari juga dapat menjalankan perannya di sektor publik yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan publik seperti dalam musrenbang di kecamatan, rapat desa, masuk BAPERDES, jadi aparat desa. Di sini perempuan turut menentukan kebijakan di desanya, dan dapat mewakili aspirasi perempuan di desanya sehingga kebijakan, ataupun program desa tidak bias gender. Karena merupakan satu-satunya lembaga yang sebagai wadah pemberdayaan perempuan desa yang tetap eksis sampai sekarang. Maka PKK Desalah yang sering mereka gunakan untuk menyampaikan aspirasinya. Program pemberdayaan bidang politik di wadahi dalam organisasi perempuan Kartini namun aktifitasnya tidak ada sama sekali. Karena program ini benar-benar baru bagi mereka sebagai tindak lanjut dari pelatihan tata pemerintahan tanggap gender yang mereka ikuti di Kabupaten Jember. Berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan di bidang politik yang diwadahi dalam organisasi perempuan Kartini ini perlu pembinaan lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas terkait yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku penanggung jawab program baik teknis, keterampilan dan pendanaan sehingga organisasi perempuan di bidang politik di Desa Tegalsari dapat mencapai sasaran.

Program kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK Desa Tegalsari yang juga berjalan dengan baik adalah pemberdayaan di bidang kesehatan. Pemberdayaan bidang kesehatan diaktualisasikan melalui kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia. Pelaksanan posyandu tetap eksis sampai sekarang.

Perilaku perempuan desa semacam ini adalah melihat PKK desa sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu mereka selalu berusaha menjaga dan melestarikan keberadaan PKK desa tersebut.

Dari beberapa program pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini nampak mempunyai satu kesatuan yang mendukung dari tujuan PKK itu sendiri. Dan dengan masuknya perempuan Desa Tegalsari sebagai pelaksana dan sasaran program menunjukkan telah terjadinya perubahan atau pergeseran tata nilai dalam masyarakat.

Di landasi oleh pendekatan pemberdayaan menurut Moser dalam naqiyah(2005) maka dengan gerakan kaum perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di PKK Desa Tegalsari, maka gerakan tersebut tidak hanya

menggeser peran perempuan dari peran domestik yaitu dominan dalam rumah tangga menjadi peran ganda yaitu peran domestik dan publik tetapi juga menunjukkan bahwa kaum perempuan mampu memberdayakan dirinya untuk mengemban peran ganda tersebut. Dengan upaya pemberdayaan tersebut lambat laun akan terjadi pergeseran tata nilai dalam masyarakat Jember khususnya Desa Tegalsari bahwa konsepsi perempuan yang semula hanya sekedar "konco wingking" akan berubah karena melihat kenyataan bahwa perempuan juga mampu berperan ganda baik peran pada sektor domestik maupun pada sektor publik.

Strategi PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan Desa

Untuk memberdayakan kelompok yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, maka diperlukan strategi. Karena strategi merupakan sebuah jalan untuk mencapai tujuan, dalam pemberdayaan strategi lebih banyak membicarakan bagaimana yang belum berdaya menjadi lebih berdaya. Menurut Mahardika (2000:76) dikatakan bahwa dalam merancang strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan dua cara sekaligus, yaitu :

- a. Melakukan tindakan-tindakan guna mengubah kebijakan (*policy*) dan menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil. Langkah ini diproyeksikan sebagai upaya untuk memperluas ruang rakyat untuk mengembangkan kapasitas kritisnya dengan bebas dan terjamin secara hukum dan politik.
- b. Mempersiapkan basis pendukung proses perubahan sosial yang menyeluruh. Tindakan ini untuk mengembangkan suatu level kesadaran tertentu dikalangan masyarakat yang berkepentingan dengan perubahan dan pada gilirannya menjadi pijakan dalam membangun organisasi-organisasi masyarakat, yang independen dan dapat menjadi instrumen untuk mengubah ketidakadilan menjadi keadilan.

Sebagai salah satu lembaga masyarakat yang menjadi wahana pemberdayaan perempuan, PKK desa Tegalsari dalam proses mencapai tujuan untuk memberdayakan perempuan desa yang belum berdaya menjadi berdaya, dan yang sudah berdaya menjadi lebih berdaya lagi. Sehingga diharapkan pemberdayaan perempuan di Desa Tegalsari melalui PKK Desa mencapai fase pemberdayaan emansipatoris, dimana perempuan sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri. Puncak dari kegiatan masyarakat adalah ketika berada pada fase emansipasi ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan perempuan desa, strategi yang diterapkan PKK Desa Tegalsari meliputi dua strategi yaitu :

1. Strategi internal meliputi :

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan perempuan desa. Demensi yang perlu dikembangkan meliputi :

- 1) Pengembangan program.

Dengan memperbaiki kualitas program yang sudah ada dengan menjadikan sarana dan prasarana yang memadai dan mutu pelayanan yang lebih bagus, juga pengembangan program baru yang dirasakan sudah mendesak untuk dilaksanakan.

- 2) Pengembangan manajemen

Pengembangan manajemen sudah dimulai sejak perencanaan program kerja, pembagian tugas dan fungsi yang jelas bagi pengurus, kader, dan anggota PKK Desa, kepemimpinan yang demokrasi, yang mengutamakan musyawarah, koordinasi yang baik dalam setiap permasalahan dalam organisasi.

- 3) Pengembangan budaya organisasi

Adanya aturan atas dasar kesepakatan bersama yang harus dilakukan dalam berorganisasi, proses demokrasi dan musyawarah mufakat harus dikedepankan dalam permasalahan organisasi. Transparansi dari pengurus dan anggota harus ditegakkan. Keberdayaan dan kemandirian organisasi harus ditunjang tinggi.

- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu peningkatan mutu dan pengetahuan pengurus dan kader, serta anggotanya melalui pendidikan seperti mengikuti pelatihan-pelatihan kader, yaitu kader posyandu, BKB, UPPKS, PAUD, dan mengikuti keterampilan menjahit dan pengeringan buah-buahan dan biji-bijian.

2. Strategi Eksternal

- a. Membangun mitra kerja dengan pemerintah daerah dalam bidang teknis, keterampilan, pendanaan melalui instansi terkait (BKKBN, Dinkesos, PM, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal, dan lain-lain).
- b. Menjalin kerja sama dengan TP PKK Kecamatan dan Kabupaten dalam pameran produk PKK dalam rangka perluasan pasar, pelatihan kader, dan bantuan dana.
- c. Menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lokal yaitu Bank BPD cabang Jember untuk dapat mengakses kredit sebagai modal di bidang ekonomi melalui UPPKS.
- d. Mengikuti lomba baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, bahkan tingkat nasional.

Strategi internal yang diterapkan PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan program pemberdayaan perempuan, dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menjadi motor penggerak pada pemberdayaan perempuan desa dan peningkatan SDM adalah merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam rangka kinerja PKK Desa tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas PKK Desa dibutuhkan manajemen alternatif atau strategi yang tidak berlandaskan organisasi yang birokratif tetapi strategis. Dalam organisasi yang birokrasi, tiap aspek dari struktur dirancang untuk menjamin kehandalan tingkah laku dan pertanggungjawabannya terhadap pusat. Pusat mempunyai kontrol menyeluruh. Semua keputusan tentang inovasi tertentu, perubahan, atau adaptasi dalam strategi harus berasal dari pusat. Keadaan ini mengakibatkan organisasi menjadi kaku, dan kurang efektif bagi lingkungan yang sedang mengalami perubahan pesat

Salah satu hal terpenting dari manajemen strategi adalah bagaimana mengembangkan daya tanggap organisasi yang lebih baik terhadap kebutuhan kelompok sasarannya. Sebagai salah satu agen pemberdayaan perempuan PKK Desa Tegalsari harus berusaha mengembangkan program yang dirasakan perlu untuk kelompok sasarannya, baik dengan memperbaiki kualitas program yang sudah ada dengan dukungan sarana dan prasarana dan mutu pelayanan yang lebih baik. Dan juga pengembangan program baru yang dirasakan sudah mendesak untuk dilaksanakan.

Sebagai wahana pemberdayaan perempuan desa PKK Desa Tegalsari dengan berbagai kegiatannya dalam pengembangan program kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini akan menghambat proses pelaksanaan dalam pengembangan program untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap kelompok sasaran.

Sarana yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi adalah sarana kantor seperti komputer, sarana keterampilan yang menunjang usaha produktif di bidang ekonomi, dan tempat/gedung sendiri untuk melaksanakan aktifitas organisasi. Sedangkan pengembangan program baru didasarkan atas kebutuhan masyarakat khususnya perempuan. Seperti PAUD dilaksanakan atas dasar adanya balita-balita yang ibunya sibuk bekerja dan berdagang maka perlu adanya tempat penitipan balita yang profesional, sehingga balita mendapatkan pendidikan dan pengasuhan sebagai mana mestinya.

Selain tersebut di atas secara ideal setiap orang dalam organisasi harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan organisasi dan apa yang setiap orang lakukan di organisasi, yang perlu diusahakan adalah terciptanya suasana dan sikap keterbukaan organisasi. Keputusan dibuat berdasarkan atas pertimbangan tujuan organisasi, nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi dan memperhitungkan apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasi. Hal tersebut dalam strategi PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan program pemberdayaan perempuan desa tercermin pada pengembangan manajemen dan pengembangan budaya organisasi. Adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas bagi pengurus, kader, dan anggota. Kepemimpinan yang demokratis yang mengutamakan musyawarah dan koordinasi dalam setiap permasalahan organisasi, dan adanya aturan atas dasar kesepakatan bersama yang harus dilakukan dalam organisasi.

Yang tidak kalah pentingnya dalam proses pemberdayaan harus ditunjang oleh sumber daya yang kompeten supaya dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Ketidak mampuan sumber daya manusianya berdampak

kekurangmampuannya menggunakan teknologi dalam arti luas, misalnya sistem komunikasi dan manajemen.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting bagi organisasi pemerintah maupun swasta. Peranan SDM dalam organisasi tidak hanya tidak hanya dapat dilihat dari hasil produktifitas kerja, tetapi juga dari kualitas kerja yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh lagi keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh Sumber Daya Alam (SDA) tetapi oleh SDM yang dimiliki. Semakin kuat pengetahuan SDM suatu daerah maka akan semakin kuat daya saing daerah tersebut. Begitu juga semakin kuat pengetahuan SDM dalam suatu organisasi maka akan semakin kuat daya saing organisasi tersebut. Terlebih lagi realitas saat ini, dunia memasuki globalisasi yang menghadapkan suatu organisasi pada kondisi persaingan yang sangat tajam, tidak hanya ruang lingkup lokal, regional tetapi global. Persaingan yang terjadi mengharuskan suatu organisasi merubah dan menggeser fungsi-fungsi manajemen selama ini sebagai hanya kegiatan administrasi semata berubah fungsi yang terintegrasi dengan fungsi lainnya dalam organisasi yaitu aliansi strategik yang bersama-sama bagian lain mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Untuk menghadapi era globalisasi tersebut, pengurus, kader, dan anggota organisasi seperti PKK perlu terus meningkatkan kemampuan dan kemajuan saat ini. Kemampuan yang diperoleh pada pendidikan dan pelatihan sebelumnya memungkinkan sudah tidak memadai lagi. Perubahan tata nilai dalam pergaulan dunia menyebabkan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti menjadi kadaluarsa. Menghadapi keadaan yang demikian, dari waktu ke waktu kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan pengurus, kader, dan anggota suatu organisasi seperti PKK sangat relevan dengan penyiapan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam memberi layanan publik pada era globalisasi sekarang ini.

Hal ini sudah disadari oleh Tim Penggerak PKK Desa Tegalsari, bahwa peningkatan SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pemberdayaan perempuan desa. Seiring dengan pendidikan masyarakat yang dilayani semakin maju, kecanggihan teknologi, dan arus informasi yang cepat sebagai dampak dari globalisasi. Peningkatan mutu dan pengetahuan pengurus, kader, dan anggota PKK Desa dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

Strategi PKK Desa Tegalsari dalam meningkatkan program pemberdayaan perempuan selain menerapkan strategi internal dalam rangka penguatan lembaga dan peningkatan mutu SDM, juga harus didukung dengan penerapan strategi eksternal dalam rangka peningkatan hubungan dan kerja sama, dengan memperluas jaringan kerja (Networking). Pada umumnya terdapat dua jenis hubungan kerja, yaitu (1) jaringan kerja fungsional yang mementingkan partisipasi dan relevansi; dan (2) institusional, yang mementingkan keanggotaan, koordinasi, dan formalitas.

PKK Desa Tegalsari menerapkan jaringan kerja yang sifatnya fungsional. Jaringan kerja ini meliputi bidang teknis, keterampilan, pelatihan, perluasan pasar, akses modal, dan bantuan dana. Jaringan kerja ini diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan baik yang terdapat pada individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam era globalisasi

dan sebagai antisipasi menghadapi abad 21, PKK Desa tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan dampak dari luar, sehingga kemitraan perlu dibina agar efisiensi dalam pembagian kerja dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Kemitraan yang dibangun oleh PKK Desa Tegalsari baru sebatas tingkat lokal yaitu TP. PKK. Kecamatan Ambulu, TP.PKK Kabupaten Jember, BPD Cabang Ambulu, dan pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui instansi-instansi terkait. Kalaupun ada kerja sama dengan lembaga di atas tingkat Kabupaten melalui lembaga yang ada di Kabupaten.

Dalam abad informasi ini jaringan kerja PKK Desa Tegalsari seharusnya jangan hanya pada tingkat lokal saja apa lagi hanya tingkat Kecamatan dan Kabupaten, hal ini menyebabkan kerja sama yang diperoleh akan lebih sempit dan terbatas. Untuk itu jaringan kerja yang dilakukan harus diperluas ketingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat propinsi, nasional dan seterusnya, sebab jaringan kerja ini merupakan faktor penting untuk memberdayakan PKK Desa Tegalsari sendiri dan memperoleh dampak positif dalam menjalankan program dan aktifitasnya sebagai agen pemberdayaan perempuan.

Mitra kerja dengan pemerintah yang dibangun oleh PKK Desa Tegalsari dapat menjadi inisiatif sendiri ataupun inisiatif pemerintah daerah. Menurut Prijono dalam Wiyoto (2005) ada tiga pola hubungan antara lembaga non pemerintah dengan pemerintah, yaitu asosiatif, paralel, dan konfliktif. Hubungan ini bisa bersifat sangat dekat, sejajar, atau mengambil jarak dengan pemerintah. Dalam hubungan yang asosiatif sering kali dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah, karena kerja sama yang sangat erat dengan pemerintah atau dibentuk untuk kepentingan pelaksanaan program pemerintah, sehingga semangat dan gerakannya tidak mengakar pada upaya membela masyarakat yang tertekan. Meskipun partisipasi masyarakat pada program pembangunan ada, tetapi lebih merupakan hasil mobilitasi dari pada inisiatif dari bawah. Dalam hubungan asosiatif ini lembaga non pemerintah melaksanakan kebijakan pemerintah, disamping sangat tergantung dana pemerintah.

Hubungan yang dijalin PKK Desa Tegalsari dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah merupakan hubungan paralel. Dimana PKK Desa Tegalsari membangun mitra kerja dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi-instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan sebagainya) dalam rangka kerja sama teknis, keterampilan, pendidikan dan pelatihan, serta pendanaan.

Kerja sama yang dibangun antara PKK Desa Tegalsari dengan pemerintah daerah bersifat adanya saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lainnya sehingga menjadi mitra kerja. PKK desa bermitra dengan pemerintah akan banyak keuntungan terutama dapat dukungan baik teknis, keterampilan, pendidikan dan pelatihan, bahkan dana.

Sehingga dalam menjalankan misi sebagai aktor pemberdayaan perempuan desa dapat berjalan lebih baik dari pada dilaksanakan sendiri. Demikian sebaliknya, pemerintah daerah yang menjadi agen pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat yang selalu membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam setiap

melaksanakan program-program pembangunan pemerintah daerah. Tanpa dukungan masyarakat setempat program-program pembangunan khususnya pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan ada artinya. Masyarakat akan bersifat apatis terhadap apa yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tujuan dari pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah tidak mencapai sasaran. Sebaliknya keterlibatan masyarakat sedemikian penting karena masyarakat mempunyai kemampuan untuk mendukung kualitas karya yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun antara PKK Desa Tegalsari dengan Pemerintah Daerah melalui instansi-instansi terkait belum membuahkan hasil yang maksimal. Karena kerja sama yang dijalin dalam suatu program biasanya tidak dibarengi dengan program lanjutan, sehingga program yang sudah didapat tidak dapat dikembangkan. Seperti misalnya program pelatihan keterampilan pengeringan buah-buahan dan biji-bijian karena setelah latihan tidak ada tindak lanjutnya akhirnya keterampilan yang dimiliki tidak dimanfaatkan. Pada hal, hal ini dapat dikembangkan dalam peningkatan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok UPPKS yang sudah ada seandainya ada binaan lanjutan di bidang teknis, permodalan, dan pasar.

Kerja sama yang dibangun dengan pihak swasta diantaranya BPD Cabang Ambulu dalam mengakses kredit juga memiliki dampak positif dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh PKK Desa Tegalsari. Karena disadari faktor dana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka mensukseskan suatu program pemberdayaan dengan didukung oleh faktor-faktor lain seperti SDM, sarana dan prasarana. Dengan mendapatkan dana dari pihak swasta yaitu BPD Cabang Jember dapat bermanfaat bagi peningkatan program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Dengan demikian berarti dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan di Desa Tegalsari bukan menjadi monopoli pemerintah daerah, namun sudah ada keterlibatan swasta dan masyarakat khususnya perempuan yang dalam administrasi publik disebut tiga pilar penyelenggaraan pembangunan negara yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. (Wiyoto, 2005) Namun kerja sama yang telah dibangun perlu dimaksimalkan sehingga program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan membuahkan hasil yang maksimal sesuai sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan pembahasan yang diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan desa oleh PKK desa Tegalsari sudah berjalan dengan baik. Sudah ada kesadaran secara mandiri akan pentingnya keterlibatan perempuan desa dalam program pemberdayaan bukan hanya sebagai sasaran kegiatan tetapi juga terlibat dalam proses pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Desa Tegalsari sudah dapat memberdayakan dirinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarganya. Aspek pemberdayaan perempuan yang dilakukan PKK Desa Tegalsari meliputi

pemberdayaan bidang pendidikan, pemberdayaan bidang ekonomi, pemberdayaan bidang sosial-budaya, pemberdayaan bidang politik, dan pemberdayaan bidang kesehatan. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dari pemberdayaan bidang ekonomi melalui kelompok UPPKS. Sedang pemberdayaan perempuan di bidang politik melalui kelompok politik perempuan namun tidak ada aktifitasnya sama sekali.

2. Strategi yang dilakukan PKK Desa Tegalsari dalam peningkatan program pemberdayaan perempuan desa menerapkan Strategi internal meliputi : Memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan perempuan desa dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi eksternal : Membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bidang teknis, keterampilan, pendanaan melalui instansi terkait (Dinkesos, Dinas Kesehatan, Dinas Naker dan Penanam Modal, dll), Menjalinkan kerja sama dengan TP.PKK Kecamatan dan Kabupaten dalam pameran produk PKK dalam rangka perluasan pasar, pelatihan kader, dan bantuan dana, Menjalinkan kerja sama dengan lembaga keuangan lokal yaitu Bank BPD cabang Ambulu untuk dapat mengakses kredit sebagai modal di bidang ekonomi melalui kelompok UPPKS yang dijadikan kredit modal bagi anggotanya, Mengikuti lomba baik ditingkat kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan tingkat nasional.

Saran

Untuk mengoptimalkan peran PKK Desa Tegalsari dalam melaksanakan tugasnya sebagai wahana pemberdayaan perempuan desa di Kabupaten Jember, khususnya Desa Tegalsari perlu didukung berbagai hal, yaitu :

1. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berarti daerah diberi otonomi luas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu daerah harus menyesuaikan diri untuk memiliki peraturan daerah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan termasuk peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke tingkat yang lebih tinggi bagi kader-kader PKK Desa sebagai fasilitator pemberdayaan perempuan desa. Pemberdayaan harus dimulai dari diri kita masing-masing dimana pendidikan merupakan faktor kunci, untuk itu kader-kader PKK Desa di Kabupaten Jember sebagai fasilitator pemberdayaan perempuan desa harus dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal yaitu melalui pendidikan, kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.
3. Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan pemberdayaan perempuan yang lebih memadai di PKK Desa. Kebanyakan PKK Desa dalam melaksanakan aktifitasnya belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, untuk itu perlu dipenuhi fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan desa

seperti sarana keterampilan, sarana pendidikan dan kesehatan, dan sarana pengempangan ekonomi produktif dan pemasarannya seperti koperasi wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang Pres Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Fakih, Mansour. 2009. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah. 2007. Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi. Malang : YA3 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. 2005. Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK.
- Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research. (Jilid I). Jogjakarta: Andi Offset.
- Kantor Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan Tahun 2000-2004.
- Mahardika, Timur. 2000. Gerakan Masa : Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai.
- Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2006. Metodeologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) .Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Naqiyah, Najlah, 2005. Otonomi Perempuan. Bayumedia, Malang.
- Remi, Sutvastie S dan Tjiptoherijanto Priyono, 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Roqib, Mohammad, 2002. Pendidikan Perempuan. Gama Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. C.V Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani dan Rosidah. 2003. manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sumaryadi, Nyoman I, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Wiyoto, Budi (2005) Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Prespektif Good Governance, Partner Consulting, Malang.